

POLITIK MEDIA: DILEMA MEDIA DALAM ERA DEMOKRASI DI INDONESIA

Oleh : Zainorr Ridho

Abstrak

Pers bisa mengarahkan persepsi kita secara efektif ketika kita tidak memiliki informasi yang bertolakbelakang dan ketika pesan memiliki kesamaan pandangan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dalam konsepsi ini, menumbuhkan keaslian juga merupakan tekanan dari persepsi awal. Perbedaan laporan tentang peristiwa yang berbeda memiliki suatu kebiasaan buruk dan pengaruh yang besar bahwa apa yang terjadi mendukung pandangan sebelumnya. Untuk memahami proses ini sebagai salah satu "*minimal effects*" karena hal ini sekedar untuk memperkuat pandangan yang ada dan tidak berubahnya yaitu untuk memperhatikan fakta yang tidak pernah diinginkan dalam merubah dan sungguh didesign menjadi ortodoksi dominan.

Jika media tidak bisa mentransformasikan pendapat kita, maka bisa mengkerangkakan persepsi realitas yang ada di sekitar kita. Disini yang paling penting dari pengaruh media adalah untuk mengatur isu-isu penting yang dapat membantu menginformasikan apa yang diinginkan oleh masyarakat, memilih untuk apa menekan dan untuk apa mengabaikan atau menghentikan, pengaruh pengorganisasian dunia politik kita. Media tidak akan selalu bisa menjelaskan kepada kita untuk apa berfikir, tetapi mereka secara mengesankan benar-benar berhasil dalam menjelaskannya berfikir tentang apa.

Selain sosial, budaya, dan agen-agen pendidikan, media mengajarkan visi yang bagus, mengkondisikan untuk menyadari persoalan-persoalan kemasyarakatan sebagai bagian yang terisolasi, termasuk kritik yang bermutu. Kausalitas yang lebih besar direduksi menjadi peristiwa-peristiwa yang berbeda, baik hubungannya dengan kesehatan, kekuasaan, dan kebijakan yang tidak dilaporkan secara

benar. Tidak ada yang esensial dan terbuka yang tidak bisa diabaikan oleh pers dan tidak ada cukup serius dan pura-pura yang tidak bisa dibiarkan oleh permainan yang kasar.

Kata Kunci : Politik Media, Demokrasi

A. Pra Wacana

Apakah media mengatur pikiran kita? Apakah media bebas dari pengaruh pemerintah? Jika tidak, apa sesungguhnya pengaruh itu? Apakah media didominasi oleh sebagian kecil kelompok kepentingan (elit)? Jika ia, apakah dominasi ini mempengaruhi terhadap isi media? Apakah pengawasan terhadap isi berita menunjukkan bentuk propaganda? Apakah propaganda mewujudkan indoktrinasi terhadap persepsi masyarakat? Dan apakah indoktrinasi mengimplementasikan dukungan bagi kebijakan-kebijakan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menuntut adanya beberapa bukti-bukti:

1. Di Amerika, kebebasan pers diartikan sebagai satu bentuk yang dihalangi oleh *repressive law*. Sebagaimana yang kita temukan, campurtangan pemerintah dalam membuat berita bukan saja menjadi masalah bahkan menjadi masalah utama. Bahayanya, jika pers bergandengtangan dengan kepentingan penguasa, seringkali sebagai manifestasi dari kepentingan tersebut untuk para pembuat kebijakan. Bahkan muncul pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang menimbulkan kritik yang tidak mempertimbangkan terhadap kepentingan lain daripada kepentingan penguasa sendiri.
2. Wartawan yang berpartisipasi dalam forum-forum kebebasan pers biasanya menjadi ancaman bagi pers dari pemilik media tersebut.... Apakah media bebas dari campur tangan oleh pemiliknya? Apakah pemilik menuntut adanya kontrol terhadap informasi yang berlebihan, atau apakah tanggungjawab bagi berita masih tergantung pada kewenangan para jurnalis dan editor yang bebas untuk melaporkan apa yang mereka inginkan – yang dibatasi oleh profesionalitas etika pers? Sebagaimana kita lihat,

pekerjaan pers, termasuk editor surat kabar dan produser berita televisi dan bahkan direktur eksekutif media, merupakan tanggungjawab pemilik media dan perusahaan. Secara khusus, pemilik media melakukan pengawasan meliputi jabatan rendah dan tinggi, menaikkan dan menurunkan seseorang yang mereka inginkan dan dengan regulasi langsung kedalam proses produksi berita-berita dengan lisan maupun tulisan.

3. Tetapi apakah pengawasan yang berlebihan terhadap isi media dan personelnya menunjukkan adanya propaganda *ruling class*? Seandainya kita boleh menentukan apa yang dipublikasikan dan yang tidak, bisakah diasumsikan bahwa hasil akhir membantu kepentingan mereka dan memberikan hanya pandangan mereka? Saya berargumen bahwa, kecuali kepentingan sesaat, perspektif ideologi kapitalis mengakui peristiwa yang secara faktual terjadi. Sistem kerja pengawasan, meskipun tidak dengan kesempurnaan absolut, dan tidak berarti apa-apa tentu akan menjadi lebih berkuasa.
4. Perhatian yang terkahir: apakah propaganda *ruling class* mewujudkan indoktrinasi masyarakat? Hal ini dipahami bahwa sekalipun berita itu diberikan kepada seorang yang berideologi kapitalis, maka masyarakat tidak memperbolehkannya dan mempercayai cara propaganda tersebut. Berita-berita bisa dimanipulasi oleh kekuasaan pers. Tetapi apakah kita dimanipulasi oleh berita itu? Inilah pertanyaan terakhir yang ingin saya kemukakan disisi pada beberapa kajian.

Pada awal kajian tentang dampak media terhadap pilihan *voting* yang ditemukan bahwa masyarakat benar-benar bebas dari manipulasi media. Propaganda dalam kampanye biasanya memperkuat pilihan masyarakat daripada merubah pilihan mereka. Masyarakat mengekspose dirinya sendiri ke media dengan selektif, kepercayaan yang dibangun atas pandangan mereka sendiri. Pendapat mereka dan beberapa informasi yang dipengaruhi oleh kelompok-kelompok sosial, dan komunitas-komunitas, sehingga individu tidak bertahan tanpa sebuah perlawanan yang kuat dari media. Pers, dapat

disimpulkan, hanya memiliki suatu "*minimal effect*" (pengaruh minimal).

Pandangan *pertama*, beberapa temuan tersebut menyenangkan: masyarakat kelihatannya agak lebih baik dalam respon mereka terhadap media dan tidak boleh mereka sendiri menjadi objek dari media tersebut. Demokrasi adalah menyelamatkan. Tetapi banyak pertanyaan yang mengganjal. Jika termasuk "*selective exposure*" (pengungkapan yang selektif) dan "*selective attention*" (perhatian yang selektif), maka kita menggunakan media utamanya untuk menguatkan kecenderungan kita sendiri, darimana predisposisi mereka sendiri muncul? Kita bisa menentukan agen-agen sosial: keluarga, sekolah, kelompok-kelompok bangsawan, tempat bekerja – dan media itu sendiri. Yang pasti predisposisi politik yang terinternalisasikan muncul dari dominasi budaya politik bahwa media mempunyai suatu kewenangan dalam menjaga dan secara langsung menentukan terhadap media itu sendiri.

Kemampuan kita untuk melakukan diskriminasi terbatas oleh bagaimana kita dikonsolidasikan oleh pengungkapan media sebelumnya. Seleksi itu kita lakukan bukan sebagai suatu otonomi tertentu untuk propaganda tetapi mungkin awal kebenaran didalamnya, yang memilih salah satu atau variasi yang lain dari tawaran lembaga yang sama. Dalam keadaan tertentu, seleksi kita didesain untuk menghindari informasi dan pandangan-pandangan yang kontradiktif propaganda dominan, yaitu propaganda yang disalurkan secara implisit dengan mewakili terhadap arti sesuatu. Jadi, persepsi politik dan seleksi masyarakat terhadap media ditentukan oleh bukti-bukti dari pengaruh minimal dari organisasi-organisasi media.

Lebih jauh, beberapa bukti empiris menyarankan bahwa, berlawanan dengan teori awal "*minimal effect*", berita media dapat mengarahkan perhatian kita terhadap isu-isu penting dan menjaga pendapat kita tentang hal tersebut. Salah satu kajian yang ditemukan bahwa partisipasi yang mengungkapkan konsistensi media tentang

pertahanan atau tentang polusi menumbuhkan kepercayaan bahwa pertahanan atau polusi menjadi masalah utama"... kajian lain yang ditemukan bahwa fluktuasi perhatian publik terhadap masalah-masalah seperti hak-hak sipil, Vietnam, kejahatan, dan inflasi yang lebih dari dua dekade dalam perhatian digagalkan oleh media utama.....

Para teoritisi menegaskan bahwa media hanya mempunyai suatu pengaruh minimal pada kampanye-kampanye akan mencoba menakutkan para kandidat politik yang percaya bahwa mereka tetap bertahan dan binasa disebabkan karena ekspose media. Dan dulu, ketidakmampuan untuk membeli media atau menarik liputan pers menyerahkan kandidat partai ketiga terhadap para politisi Amerika yang kurang mampu. Kekuasaan untuk mengabaikan pandangan politik lain daripada permintaan dua partai yang lebih minimal, hal ini menjadi monumental.

Jadi, pers bisa mengarahkan persepsi kita secara efektif ketika kita tidak memiliki informasi yang bertolakbelakang dan ketika pesan memiliki kesamaan pandangan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dalam konsepsi ini, menumbuhkan keaslian juga merupakan tekanan dari persepsi awal. Rupanya perbedaan laporan tentang peristiwa yang berbeda memiliki suatu kebiasaan buruk dan pengaruh yang besar bahwa apa yang terjadi mendukung pandangan sebelumnya. Untuk memahami proses ini sebagai salah satu "*minimal effects*" karena hal ini sekedar untuk memperkuat pandangan yang ada dan tidak berubahnya yaitu untuk memperhatikan fakta yang tidak pernah diinginkan dalam merubah dan sungguh didesign menjadi ortodoksi dominan.

Salah satu pandangan negatif tentang Sandinistas menunjukkan adanya bukti terhadap kebijakan pemerintah Amerika yang bertentangan dengan Nicaragua. Alasan yang lain, seperti ketakutan akan keberadaan orang Amerika, ketakutan akan perang, ketakutan dalam membayar pajak, masyarakat menjadi tidak bersemangat untuk bersama-sama dengan intervensi Amerika. Tetapi image negatif tentang Nicaragua yang dipropagandakan oleh

pemerintahan dan pers membiarkan para pengambil kebijakan dengan menekan intervensi langsung oleh tentara Amerika.

Jika media tidak bisa mentransformasikan pendapat kita, maka bisa mengkerangkakan persepsi realitas yang ada di sekitar kita. Disini yang paling penting dari pengaruh media adalah untuk mengatur isu-isu penting yang dapat membantu menginformasikan apa yang diinginkan oleh masyarakat, memilih untuk apa menekan dan untuk apa mengabaikan atau menghentikan, pengaruh pengorganisasian dunia politik kita. Media tidak akan selalu bisa menjelaskan kepada kita untuk apa berfikir, tetapi mereka secara mengesankan benar-benar berhasil dalam menjelaskannya berfikir tentang apa.....

Selain sosial, budaya, dan agen-agen pendidikan, media mengajarkan visi yang bagus, mengkondisikan untuk menyadari persoalan-persoalan kemasyarakatan sebagai bagian yang terisolasi, termasuk kritik yang bermutu. Kausalitas yang lebih besar direduksi menjadi peristiwa-peristiwa yang berbeda, baik hubungannya dengan kesehatan, kekuasaan, dan kebijakan yang tidak dilaporkan secara benar. Tidak ada yang esensial dan terbuka yang tidak bisa diabaikan oleh pers Amerika dan tidak ada cukup serius dan pura-pura yang tidak bisa dibiarkan oleh permainan yang kasar.

Alhasil, media meletakkan batasan-batasan tentang wacana publik dan pemahaman publik. Mereka tidak akan selalu mentransformasikan pendapat tersebut tetapi mereka tidak selalu memilikinya. Hal ini cukup bahwa mereka menciptakan pendapat yang sangat visioner, memberikan legitimasi terhadap pandangan yang jelas dan ketidakabsahan kepada yang lain. Media sama-sama meletakkan isu-isu penting bahwa mereka menjadi kandidat, legitimasi bagi mereka, baik menyerahkan kepada yang lainnya. Kekuasaan ini untuk menentukan agenda isu, perkembangan informasi, dan permanen debat politik sehingga bisa menciptakan moderasi politik media yang cukup membanggakan.

B. Pembahasan

Masalah-masalah tentang ketidaksamaan atau ketidakadilan terhadap media massa menunjukkan bahwa kebebasan pers belum bisa maksimal dijalankan. Padahal media massa menjadi perantara komunikasi yang selalu dibutuhkan antara – dalam konteks negara – pemerintah, masyarakat, kelompok-kelompok sosial (LSM), organisasi kemasyarakatan, atau komunitas-komunitas masyarakat. Kehadirannya memberikan informasi kepada semua kalangan.

Media dalam konsepsi demokrasi merupakan salah satu indikator bahwa kebebasan berekspresi dijamin oleh Undang-Undang. Sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 yang berbunyi “Kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Dengan konsepsi ini bahwa kebebasan pers dalam mengekspresikan pikirannya baik melalui media cetak maupun elektronik dijamin keberadaannya oleh negara. Bahkan pers sendiri sebagai pendukung awal terciptanya opini publik untuk mendapatkan informasi dari apa yang telah media infornasikan.

Media menurut Firmanzah⁴¹ memiliki kemampuan untuk mempengaruhi opini publik dan perilaku masyarakat. Media dianggap memiliki peran yang sangat penting dalam mentransmisi dan menstimulasi permasalahan politik. Hal ini menjadi sangat penting dalam kampanye partai politik. Cakupan yang luas dalam masyarakat membuat media massa dianggap sebagai salah satu cara yang efektif dalam mengkomunikasikan program kerja, pesan politik, pembentukan image partai atau seseorang (kandidat politik). Saking hebatnya pengaruh media massa, sejumlah pihak memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan yang kurang patu, misalnya media massa sangat efektif dalam strategi pembunuhan karakter (*black campaign*). Media memiliki jaringan distribusi luas dan dapat mengantarkan berita serta informasi yang mudah dijangkau dan diakses oleh publik. Media

⁴¹ Lihat Firmanzah, *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*, Jakarta: Obor Indonesia, 2008, hal. 18.

sangat berpengaruh terhadap perilaku masyarakat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu media global dan media lokal.

Media baik global maupun lokal telah membawa implikasi yang sangat signifikan terhadap dunia politik. Keterbukaan dan kebebasan mengungkapkan pendapat telah menjadi tren global dewasa ini. Kecurangan politik dapat dengan mudah diangkat menjadi isu nasional maupun isu global. Kontrol sosial yang dilakukan oleh media global maupun media lokal memberikan tekanan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses politik untuk bersaing secara fair dan sehat. Bebasnya informasi masuk dan keluar dari suatu negara telah memudahkan masyarakat dalam membuat perbandingan dengan apa yang terjadi di negara lain.

Bertolak dari preskripsi diatas, bahwa masalah ketidakadilan terhadap media telah terjadi di Indonesia pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru dominasi kekuasaan sangat kuat ada pada para penguasa karena semua struktur politik negara telah dimanfaatkan untuk menghegemoni masyarakat melalui media. Hal ini terbukti ketika pada awal pemberontakan 1 Oktober 1965, dimana Mayor Jenderal Soeharto menjadi Presiden.

Bentuk kekuasaan yang dimiliki Soeharto pada saat itu adalah ia memproklamirkan sendiri langsung membelenggu surat kabar-surat kabar yang ada di negari ini. Dalam upaya pemberantasan yang tak ada tandingannya di Negara ini, nyaris sepertiga dari seluruh surat kabar ditutup. Di saat Orde Baru mendekati usia ketiga puluh, Negara ini pun menghadapi tantangan terbesarnya sejak pertama kali menerapkan kebijakan pers yang ketat. Orde Baru mendudukkan relasi saling mengkait yang pelik antara kekangan keamanan dan undang-undang tangan besi yang mengendalikan pers. Tak bisa diragukan lagi, hambatan-hambatan seperti ini membuat pesan-pesan media menjadi lunak sekalipun para pembaca membangun

kemampuan yang semakin terasah untuk membaca hal-hal yang serba tersirat⁴².

Media menjadi kepanjangan tangan dari kepentingan para penguasa Orde Baru untuk kepentingan politik mereka dalam sebuah negara. Dalam konstruksi sosial, media dapat diasumsikan sebagai *pertama*, media merupakan salah satu institusi atau aktor politik yang memiliki dominasi kekuasaan sangat besar; kedua media berfungsi ganda yaitu berperan dalam kepentingan-kepentingan politik atau aktor-aktor politik; dan ketiga media adalah sarana untuk menjatuhkan atau memperkuat posisi negara.

Sementara, perdebatan tentang peran dan fungsi pers di Indonesia pada masa Orde Baru didudukkan pada kerangka teori-teori ilmu sosial asal Amerika Serikat tentang pers yang berkembang selama periode 1950an dan 1960an. Dalam sederetan propaganda yang disebarluaskan ketika itu, dijelaskan bahwa ada empat jenis sistem pers yaitu pers liberal, pers otoriter, pers komunis, dan pers yang punya tanggung jawab sosial⁴³. Menurut beberapa pembuat kebijakan di jajaran pemerintahan dan sejumlah pelaku dari kalangan industri, pers Indonesia termasuk jenis yang terakhir. Karenanya pers Indonesia dinilai memiliki “komitmen untuk menegakkan jurnalisme yang bebas dan bertanggung jawab secara sosial”. Hal ini dijadikan bukti bahwa kontrol ‘otoriter’ pemerintah tidak pernah ada. Strategi ini diterapkan pemerintah guna menyuburkan rasa ‘bertanggung jawab’ di kalangan jurnalis dan redaktur. Pemerintah berharap agar insan media mengembangkan loyalitas profesi pada kepentingan masyarakat yakni menjaga kestabilan politik dan keamanan.

Melihat pertentangan antara pemerintah dan pers, antara konglomerat raksasa nasional dengan surat kabar, antara organisasi profesional dan pekerja pers, kajian ini juga berupaya untuk mengajukan beberapa pertanyaan umum tentang perubahan sosial dan politik di Indonesia. Pada masa Orde Baru, pers sebagai bentuk

⁴² Lihat David T. Hill, *Pers di Masa Orde Baru*, Jakarta: YOI, 2011, hal. 1

⁴³ *Ibid.*, hal. 69

media politik yang sangat efektif bagi hegemoni kekuasaan Soeharto. Mengingat beberapa hal:

Pertama, analisis ini menggarisbawahi kontradiksi yang semakin tajam antara kepentingan bisnis untuk memaksimalkan potensi-potensi yang menghasilkan profit dari industri media cetak dan keinginan Negara untuk mengendalikan arus informasi guna mempertahankan keamanan negara. Surat kabar atau pers cenderung menyesakkan terhadap masyarakat. Ketika perusahaan media terkait dengan anggota keluarga kepresidenan, maka kontradiksi antara kendali negara atas informasi dan kepentingan pengusaha untuk memperluas pasar dan keuntungan pun dijumpai dengan mulus. Misalnya, ketiak transmisi siaran berita internasional CNN melalui satelit Palapa milik Indonesia bisa membuat pemerintah Indonesia berang dari waktu ke waktu, hal ini menguntungkan Bambang Trihatmodjo, salah satu putra Presiden, yang perusahaannya terlibat dalam kesepakatan CNN-Palapa.

Kedua, yang menjadi persoalan ketidaksamaan dalam media adalah kekangan-kekangan negara terhadap golongan kelas menengah yang memiliki keinginan untuk terbukanya akses atas informasi dan keragaman suara dari pers yang semakin luas. Hal ini menganggap bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian dari prinsip-prinsip demokrasi. Tekanan seperti ini dapat mendorong penerbitan dan popularitas terbitan berkala seperti *Forum Keadilan*, yang memiliki laporan singkat eksplisit Hak Asasi Manusia, di tahun 1991.

Ketiga, meskipun hal ini menunjukkan bahwa kontrol media terhadap kekuasaan sebagai resiko signifikan ketika kontrol negara begitu saja dilepaskan ke tangan oligopoli media yang berkuasa, terutama ketika perusahaan-perusahaan tersebut terkait dengan mereka yang berkuasa secara politis. Ada pemikiran bahwa tingkat keragaman gagasan dan kepentingan yang saat ini dimungkinkan dalam pers Indonesia bisa menurun dengan bangkitnya konglomerat sehingga merugikan dan pada akhirnya meminggirkan surat kabar-

surat kabar yang berusia lebih tua yang tidak tergabung dalam sindikasi apa pun atau yang dikelola oleh keluarga.

Karakteristik media secara umum berbeda dengan sektor non komersial lainnya, dimana penanaman modal besar-besaran, pengaruh politik ekspresi kritis, dan suara publik acap kali serba campur aduk, sebagaimana digambarkan dalam potret politik media pada masa Orde Baru.

C. Kesimpulan

Dari tulisan Michael Parenti tentang "*Inventing Reality*" telah banyak mengungkapkan masalah-masalah *inequality* diantaranya adalah *inequality* terhadap media. Ada empat persoalan yang dikemukakan oleh Parenti dalam "*Inventing Reality*", *pertama* mengangkat masalah campur tangan pemerintah terhadap pers. Dengan kata lain, bahwa media menjadi sarana pemerintah untuk memperkuat kekuasaan yang dijalankan. Kepentingannya terletak pada pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan awak media sebagai pembuat berita. *Kedua*, pekerja pers atau wartawan tidak memiliki kebebasan apabila campur tangan pemilik modal menguasai terhadap apa yang akan diberitakan dari pekerja pers. Kebebasan seorang jurnalis dihalangi oleh pemilik media tersebut, baik media elektronik maupun media massa. Adanya campur tangan antara kepentingan pengusaha sebagai pemilik media dan wartawan sebagai pencari berita. *Ketiga*, media menjadi alat bagi para elit pemerintah dan pengusaha untuk membangun kepentingan yang sama-sama dimainkan demi tercapainya tujuan politik mereka. *Keempat*, media sebagai sarana indoktrinasi terhadap publik untuk mengikuti propaganda yang diperankan oleh pemerintah atau pemilik media dalam kepentingan tertentu. Baik dalam kepentingan bisnis maupun kepentingan politik.

Sementara, dalam konteks Indonesia, eksploitasi terhadap media terjadi pada masa Orde Baru. Media pada masa Orde Baru sebagai perpanjangan tangan dari kepentingan penguasa, yang sekaligus sebagai pengusaha atau pemilik media untuk tujuan politik

mereka. Sehingga kontrol terhadap pemerintah melalui media sangat dibatasi bahkan tidak ada ruang untuk melakukan kontrol terhadap pemerintahan Soeharto. Sehingga pemenuhan informasi yang cukup bagi publik tidak terpenuhi karena media sebagai alat hegemoni kekuasaan untuk mendoktrin persepsi masyarakat dengan cara-cara propaganda atau sosialisasi informasi yang mendukung pemerintah. Tidak adanya ruang kebebasan pers sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi kita.

DAFTAR PUSTAKA

- Green, Phillip (penyunting), *Key Concepts in Critical Theory of Democracy*, New Jersey: Humanity Press, 1933,
- Firmanzah, *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*, Jakarta: YOI, 2008
- Hill, David T., *Pers di Masa Orde Baru*, Jakarta: YOI, 2011
- Gaffar, Afan. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Haryatmoko. *Etika Politik dan Kekuasaan*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2003.
- Held, David. *Demokrasi Dan Tatahan Global: Dari Negara Modern Hingga Pemerintahan Kosmopolitan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Horikoshi, Horiko. *dan Perubahan Sosial*, Jakarta: P3M, Jakarta, 1987.
- Huntington, Samuel P. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Jakarta: Graffiti, Jakarta, 2000.
- Jackson, Karl D. and Lucian W. Pye (ed.). *Political Power and Communications in Indonesia*, Berkeley, University of California Press, 1978.